

BAB II

GAMBARAN UMUM SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL DAN ANAK (SAPDA) YOGYAKARTA

2.1 Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta

Lembaga SAPDA Yogyakarta didirikan pada tahun 2004-2005. Lembaga SAPDA Yogyakarta merupakan singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, Badan Hukum atas nama Lembaga SAPDA No. 51 tahun 2005 dengan Akta Notaris Anhar Rusli, diubah dengan No. 7 tahun 2013 dengan akta notaris Herry Sabto Widodo, dan dilakukan perubahan bentuk kelembagaan menjadi Yayasan pada Tahun 2016 dengan nama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak dengan Akta Notaris Ika Farikha No. 4 Tanggal 12 Oktober tahun 2016, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0040582.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak. SAPDA Yogyakarta beralamat di Gg. Empu Gandring III UH V No. 770 XX, Pandeyan, Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161.

Visi Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi: “Mewujudkan keadilan, kebebasan, kesejahteraan & kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak di dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia. Sedangkan, Misi dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, sebagai berikut: a) Melakukan kajian keilmuan dan penelitian ilmiah; b) Memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik

yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, disabilitas, dan anak sebagai individu yang bermartabat di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, manajemen bencana dan jaminan sosial; c) Melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, disabilitas dan anak di kalangan masyarakat luas; d) Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* di Indonesia dan luar Indonesia berkaitan inklusi sosial, gender dan disabilitas; e) Membangun SAPDA sebagai *crisis center* bagi perempuan, disabilitas dan anak; f) Mewujudkan pusat sumber sebagai pusat rujukan inklusi sosial, gender dan disabilitas; g) Menjadi organisasi yang mandiri dan profesional.

2.2 Pengalaman Yayasan SAPDA Yogyakarta

Pengalaman dari Yayasan SAPDA Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Riset dan kajian tentang isu gender dan disabilitas di dalam multisektor;
2. Advokasi serta penyusunan regulasi-kebijakan di tingkat internasional, nasional dan daerah berbasis riset dan kajian;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah-pemerintah daerah/desa, aparat penegak hukum, akademisi, aktivis dan komunitas tentang isu tata kelola program dan anggaran, serta konsep pemenuhan hak berbasis hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
4. Menyusun dan menerbitkan beragam media publikasi, modul, panduan, alat pembelajaran terkait dengan isu gender dan disabilitas dalam sektor kesehatan, hukum, pendidikan, pekerjaan, administrasi kependudukan dan jaminan sosial;

5. Melakukan pendampingan kepada perempuan disabilitas, perempuan yang mempunyai anak disabilitas dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
6. Menginisiasi aksesibilitas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas;
7. Kampanye dan sosialisasi isu gender dan disabilitas melalui beragam media yang aksesibel;
8. SAPDA Yogyakarta juga memiliki pengalaman melakukan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kelembagaan. Mulai tahun 2015- 2020, SAPDA mengelola anggaran Rp2-4 M/tahun dari berbagai sumber yang dipergunakan untuk pembiayaan operasional program, pembiayaan administrasi dan sumber daya personal dengan tim administrasi dan keuangan dengan kapasitas baik dan terpercaya. Akuntabilitas SAPDA dibuktikan dengan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat umum atau komunitas penyandang disabilitas, serta menyediakan audit laporan keuangan lembaga;
9. Advokasi hak atas perlindungan perempuan, disabilitas dan anak, serta mendorong transparansi atas kebijakan publik, juga diimplementasikan secara internal dengan beragam standar operasional prosedur terkait dengan keuangan, anti *fraud*, kode etik kelembagaan, kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kebijakan perlindungan terhadap anak, kebijakan sumber daya manusia berperspektif gender dan disabilitas

yang melindungi tenaga kerja, serta kebijakan umpan balik dan komplain terhadap program dan aktivitas yang dilaksanakan SAPDA Yogyakarta.

Dalam menjalankan visi dan misinya, SAPDA Yogyakarta menjalankan program dengan dukungan pemberi dana dalam bentuk *project* atau dijalankan dengan mandiri dengan partisipasi penuh dari pemangku kepentingan, berikut adalah rinciannya:

Tabel 1.1 Program SAPDA Yogyakarta

Nama Program	Tahun Pelaksanaan	Kerja Sama
Respon bencana	2006-2009	JRCS
Peningkatan kapasitas perempuan disabilitas	2007-2011	Global Women Fund
Peningkatan kapasitas organisasi disabilitas	2013-2015	TAF- AIPJ
Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi inklusif	2014-2016	HIVOS
Aksesibilitas informasi dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas Netra	2016	AWO
Tanggap bencana inklusif	2015	OXFAM GB
Program respon bencana Palu dengan perspektif GEDSI-JMK	2018-2019	
Program respon bencana Cianjur-JMK	2022-2023	
Kota inklusi dan sinergitas layanan kekerasan	2016	AIPJ2
Inklusi Sosial dan Keteraan Hukum	2018 – 2019	
Akses keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum	2022-2024; 2019-2021	
Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif	2018-2019	VOICE
Inklusi sosial dalam pelayanan publik	2018-2019; 2015-2016	PEDULI

Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif	2018-2019; 2014-2017	DRF
Peningkatan kapasitas dan penghapusan kekerasan	2018-2020; 2008-2018	Mamacash
Respon Bencana dan Situasi Pandemi	2020-2022	ACTION EU
Pendampingan anak disabilitas dan keluarga dengan anak disabilitas	2021-2022	Disability Rights Fund
Hak atas kesehatan seksual reproduksi dan otonomi tubuh perempuan disabilitas	2021	Women Fund Asia
Program feminis perempuan disabilitas	2024-2025	
Inisiasi DPO lead research di Indonesia CB penyandang disabilitas menjadi periset & menguatkan jaringan periset disabilitas	2024	Koneksi-DFAT

Secara spesifik, SAPDA Yogyakarta juga memiliki pengalaman dalam melakukan berbagai riset dan kajian berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa isu yang telah dijangkau oleh riset SAPDA Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir, antara lain kekerasan berbasis gender dan disabilitas, mitigasi bencana dan situasi pandemi, penyediaan layanan publik, kesehatan seksual dan reproduksi serta otonomi tubuh, pemberdayaan ekonomi, dan hukum peradilan.

Berikut adalah rincian dari riset-riset yang telah dilakukan oleh SAPDA Yogyakarta, yaitu:

1. Riset tentang Jaminan Kesehatan Bagi Disabilitas di Indonesia dan Rekomendasi Perubahan Kebijakan tahun 2008, dengan dukungan Handicap Internasional;
2. Riset tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas Baru tahun 2010, dengan dukungan dari Mama Cash;

3. Riset Analisis Sosial Aksesibilitas Pelayanan Publik 11 Kota/Kabupaten di Indonesia, The Asia Foundation-DFAT, 2014;
4. Riset tentang Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota di Indonesia, The Asia Foundation-DFAT, 2015;
5. Riset tentang Pengetahuan dan Kebutuhan Remaja Disabilitas di Indonesia tentang Kesehatan Sexual dan Reproduksi (Studi kasus 5 kabupaten/kota di Indonesia)-2015, dengan dukungan HIVOS;
6. Praktek Baik Sinergitas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas Bersama Pemangku Kepentingan (2016), AIPJ;
7. Riset tentang Dampak COVID-19 pada Penyandang Disabilitas (2020), dengan dukungan Disability Rights Fund;
8. Riset Sistem Rujukan Penanganan Perempuan dan Anak Disabilitas di DIY dan Kota Yogyakarta (2021), dengan dukungan Pemerintah Australia, tahun 2021 melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice;
9. Riset Pemantauan atas 28 Pengadilan Menuju Inklusif Dampungan SAPDA (2021), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice;
10. Riset Advokasi Berfokus Otonomi Tubuh dan Hak Seksual Perempuan Disabilitas Indonesia (2021), dengan dukungan Women Fund;
11. Riset Asesmen Standar dan Potensi Kapasitas Produksi Komunitas Penyandang Disabilitas Atas Alat Pelindung Diri dan Tempat Cuci Tangan

Ramah Disabilitas (2021), dengan dukungan Uni Eropa melalui program ACTION;

12. Riset Asesmen Aksesibilitas Tempat Cuci Tangan (2021), dengan dukungan Uni Eropa melalui program ACTION;
13. Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2021 (2022), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice;
14. Laporan Hasil Pemantauan terhadap 21 Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Inklusif Dampingan SAPDA (2022), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice;
15. Riset Profil, Kapasitas dan Potensi UMKM Komunitas Penyandang Disabilitas (2022), dengan dukungan Uni Eropa melalui program ACTION;
16. Riset Situasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di DIY dengan dukungan (2022), dengan dukungan Disability Rights Fund.

2.3 Pengalaman Kerja Yayasan SAPDA Yogyakarta

Pengalaman kerja Yayasan SAPDA Yogyakarta yang fokus terkait dengan riset dalam pengalaman pelatihan, penyusunan modul dan asistensi teknis pelatihan mengenai kajian isu gender dan disabilitas diantaranya, sebagai berikut:

1. Sekolah Gender & Disabilitas sejak tahun 2010, yang berjalan sampai Angkatan ke 5 dengan model beasiswa & kemandirian peserta Beasiswa

Sekolah Riset Gender dan Disabilitas Bagi Penyandang Disabilitas & Perempuan Pengampu Disabilitas Tahun 2019, dengan peserta ada 25 perempuan disabilitas & perempuan pengampu disabilitas yang terpilih dari 1000 pelamar dari seluruh Indonesia;

2. Pelatihan GEDSI bagi mitra dan STAFF OXFAM tahun 2018;
3. Pelatihan GEDSI dan modul bagi mitra program ICDRC OXFAM (Program Perubahan Iklim) tahun 2019-2020;
4. Pelatihan GEDSI Bagi Mitra dan Staff SAMDHANA Institute tahun 2022-2023;
5. Pelatihan GEDSI bagi Ibu-Ibu PEKKA tahun 2022;
6. Pelatihan bagi Community Organizer dan Staff Yayasan Kitong Bisa untuk wilayah Papua dan Papua Barat tahun 2023;
7. Pelatihan terhadap 138 pengadilan di Indonesia dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas 2022-2023;
8. Pelatihan mengenai Sistem hukum dan Pendamping kepada 19 Organisasi Penyandang Disabilitas di Wilayah 2023.

SAPDA Yogyakarta menjalankan pekerjaan di berbagai daerah dan menjangkau beragam penerima manfaat langsung di berbagai wilayah kerja, yakni Aceh, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Malang, Jember, Bali, Banjarmasin, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Makassar, Palu dan Ternate.